

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/698/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 2022 TENTANG NOMOR TAHUN **BADAN** 1

PERMUSYAWARATAN DESA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

bertugas:

a. Menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan konsepsi; dan

b. Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada

Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Polewali 5 Mei 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

mad Sukri S H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/698/2025

TANGGAL: 5 MEI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pengarah : Bupati Polewali Mandar

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Setda.

b. Kepala Badan Keuangan.

c. Kepala Bagian Hukum Setda.

d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.

e. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan.

h. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda.

i. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.

j. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Provinsi Sulawesi Barat.

k. Unsur Biro Hukum Propinsi Sulawesi Barat.

l. Unsur Bagian Hukum Setda.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 5 Mei 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat[®] Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007